

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN**

**TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**D**

engan memanjatkan puji syukurkehadirat Allah SWT, dan atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur periode Tahun 2021-2026 telah selesai.

Penyusunan Laporan AkuntAbilitas Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 1 tahun terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan wadah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 1 tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami berharap, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 Malili, Februari 2024

KEPALA DINAS ,

**HALSEN, S.IP, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19720424 199203 1 004

**DAFTAR ISI**

*hal.*

**KATA PENGANTAR** ..……………………………………………………………………………………………. i

**DAFTAR ISI** ………………………………………………………………………………………………………. ii

**DAFTAR TABEL** ....................................................................................................... iii

**DAFTAR GAMBAR** ................................................................................................... iv

**BAB I PENDAHULUAN**…………………………………………………………………………………….1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………………. 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi ...........…….…………………………………………. 2

1.3 Sumber Daya Manusia .................................................……………....... 7

1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah………………………. 9

1.5 Strategi Organisasi ............................................................................10

1.6 Landasan Hukum ………………………………………………………………………….. 10

1.7 Sistematika Penulisan ....……………………………………………………………….. 11

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**………………………………………………………………...... 13

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026………………………..…………………..... 13

2.2 Tujuan dan Sasaran ......................................................................... 16

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan ............................................................. 21

2.4 Perjanjian Kinerja Utama ................................................................. 22

2.5 Rencana Anggaran ........................................................................ 30

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**……………………………………………………………….. 32

3.1 Capaian Kinerja DPMD KAB. Luwu Timur …..…………………………………. 34

3.2 Analisis Capain Kinerja ……………………………………….......................... 35

**BAB IV PENUTUP**……………………………………………………………………………………………89

4.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………………..89

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja…………………………………………………………... 90

4.3. Saran ………………………………………………………………………………………… 91

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BAB 1** | PENDAHULUAN |  |

* 1. **Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunan mengacu kepada Peraturam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir triwulan menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya ***Good Govarnance*** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Target Kinerja yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan Renja Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

* 1. **Gambaran Umum Organisasi**

Pembentukan Organisasi Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan desa;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM dan SDA;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
3. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
4. Subbagian Umum dan Keuangan.
5. Bidang Penataan Desa, terdiri dari:
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
   * + 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan funsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diatas adalah sebagi berikut :

* + - 1. **Kepala Dinas**

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* + - 1. Sekretariat dengan 2 sub bagian, yakni :
         1. Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
         2. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat dipimpin oleh **Sekretaris** yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.
   * + 1. **Tugas Bidang Penataan Desa** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang penataan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Desa menyelenggarakan fungsi :

* + - * 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penataan desa;
        2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset desa; dan
        3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
      1. **Tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan SDM dan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

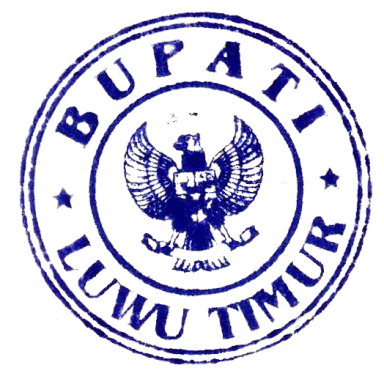
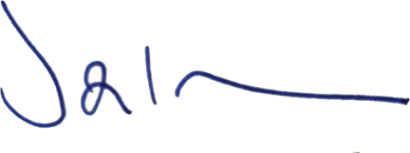
* + - * 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam pemerintah desa;
        2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan SDA desa; dan
        3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
      1. **Tugas Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

* + - * 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang badan permusyawaratan desa;
        2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
        3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Gambar 1**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



BUPATI LUWU TIMUR,

UPTD

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM

BIDANG PENATAAN DESA

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

KEPALA DINAS

BUDIMAN

* 1. Sumber Daya Manusia

Salah satu unsur penting dan penentu keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur adalah kesiapan pegawai. Jumlah pegawai penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Luwu Timur sebanyak 39 orang, terdiri dari Pegawai Sipil Negara sebanyak 16 orang PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja sebanyak 2 orang PPPK dan tenaga upah jasa sebanyak 21 orang (Tenaga Administrasi 16 orang, Cleaning Service 2 orang, Sopir 2 orang dan Penjaga Malam 1 orang). Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Data pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang.

Data pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah :

Tabel 1.1

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pendidikan | Jumlah | | Total | % |
| Perempuan | Laki-laki |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 1 | Strata Dua (S2) | 1 | 3 | 4 | 10.26 |
| 2 | Strata Satu (S1) | 17 | 5 | 22 | 56.41 |
| 3 | Diploma Tiga (D3) | 1 | 3 | 4 | 10.26 |
| 4 | SLTA | 4 | 3 | 7 | 17.95 |
| 5 | SLTP | 1 | 1 | 2 | 5.13 |
| Jumlah Total | | 24 | 15 | 39 | 100 |

*Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat DPMD Kabupaten Luwu Timur, Desember 2023*

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari jumlah 39 orang pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagian besar berpendidikan Strata Satu (S-1) yaitu 22 orang atau (56.41%), berpendidikan SLTA sebanyak 7 orang atau (17.95%), kemudian yang berpendidikan Strata Dua (S-2) sebanyak 4 orang atau (10.26%), berpendidikan Diploma Tiga (D-3) sebanyak 4 orang atau (10.26%) dan berpendidikan SLTP sebanyak 2 orang atau (5.13%).

Tabel 1.2

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pangkat/Golongan Ruang | Jumlah | | Total | % |
|  |  | Perempuan | Laki-Laki |  |  |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | Pembina Utama Muda, IV/c | - | 1 | 1 | 2.56 |
| 2 | Pembina Tingkat I, IV/b | - | 1 | 1 | 2.56 |
| 3 | Pembina, IV/a | - | 1 | 1 | 2.56 |
| 4 | Penata Tingkat I, III/d | 4 | 3 | 7 | 17.95 |
| 5 | Penata, III/c | 1 | 2 | 3 | 7.69 |
| 6 | Penata Muda Tingkat I, III/b | - | 2 | 2 | 5.13 |
| 7 | Penata Muda, III/a | 1 | - | 1 | 2.56 |
| 8 | Pengatur Tingkat I, II/d | - | - | - | - |
| 9 | Pengatur, II/c | - | - | - | - |
| 10 | Pengatur Muda Tingkat I, II/b | - | - | - | - |
| 11 | Pengatur Muda, II/a | - | - | - | - |
| 12 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 2 | - | 2 | 5.56 |
| 13 | Upah Jasa | 17 | 4 | 21 | 53.85 |
| Jumlah Total | | 25 | 14 | 39 | 100 |

*Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat DPMD Kabupaten Luwu Timur, Desember 2023*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pangkat dan golongan/ruang dari 39 orang pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagian besar adalah Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 7 orang atau (17.95%), Penata (III/c) sebanyak 3 orang atau (7.69%), Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 2 orang atau (5.13%), Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang atau (2.56%), Pembina Tingkat I (IV/b) sebanyak 1 orang atau (2.56%), Pembina (IV/a) sebanyak 1 orang atau (2.56%), dan Penata Muda (III/a) sebanyak 1 orang atau (2.63%)

* 1. **Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun
4. Kelembagaan ekonomi mikro ( BUMDES) masih belum maksimal sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
5. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal sumber daya alam yang dimiliki.
6. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya masi belum optimal sehingga penggunaan tekhnologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.
   1. **Strategi Organisasi**

Peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga permasalahan yang timbul bisa teratasi. Hal ini merupakan strategi kebijakan, kegiatan dan program, serta pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatkan kinerja organisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk aspek internal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan pembinaan kepada 125 desa berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan yag telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pembinaan organisasi ke arah birokrasi yang profesional.

* 1. **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LIngkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.
   1. **Sistematika Penulisan**

**Bab. I - Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

**Bab II - Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

**Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

*A. Capaian Kinerja Organisasi*

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

* 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
  7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. *Realisasi Anggaran*

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BAB 2** | PERENCANAAN KINERJA |  |

**2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

P

eningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

### **Visi dan Misi**

* Visi

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapain Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menetapkan Visi sebagaiman Visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu : **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.** Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni “Berkelanjutan”, “Lebih Maju”, dan “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi | Pokok Visi | Penjelasan Visi |
| “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” | “Berkelanjutan” | Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup. |
|  | “Lebih Maju” | Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capain-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum. |
|  | “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” | Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untul lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan |

*Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026*

* Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
4. Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-1 (dua), misi ke-4 (enam) dan misi ke-6 (enam)*** *dari* Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Misi I yaitu : **Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.**
2. Misi IV yaitu : **Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.**
3. Misi ke VI yaitu : **Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.**

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur khususnya yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

### **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 1, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

Misi ke 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh

Tujuan : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.

Sasaran I : Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Indikator : a) Persentase desa mandiri dengan target 13,71% atau 17 desa yang meningkat status mandiri pada tahun 2026.

b) Persentase desa tertinggal dengan target 0,00% atau 0 desa yang sudah tidak ada lagi status tertinggal pada tahun 2026.

Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.

Sasaran II : Meningkatnya Ketahanan Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa.

Indikator : a) Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dengan target 0.83% atau status mandiri pada tahun 2026.

b) Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa dengan target 0.84% atau status mandiri pada tahun 2026.

c) Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa dengan target 0.80% atau status mandiri pada tahun 2026.

Misi ke 4 : Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator : Nilai SAKIP.

Misi ke 6 : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Tujuan : Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.

Sasaran : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Indikator : Persentase desa mandiri dengan target 13,71% atau 1 desa yang meningkat status mandiri pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan tevisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan indikator a). Persentase meningkatnya desa mandiri b). Persentase menurunnya desa tertinggal
2. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa, dengan indikator a). Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa b). Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa c). Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI | Target Kinerja pada Tahun | | | | |
| AWAL 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan kemandirian pembangunan desa |  | Persentase desa mandiri | 5,65% | 7,26% | 8,87% | 10,48% | 12,10% | 13,71% |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase desa tertinggal | 4,84% | 3,23% | 1,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian program PD | 70,28 | 70.35 | 71,00 | 71,25 | 72 | 73 |

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI | Target Kinerja pada Tahun | | | | |
| AWAL 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan kemandirian pembangunan desa | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | 5,65% | 7,26% | 8,87% | 10,48% | 12,10% | 13,71% |
|  | Persentase menurunnya desa tertinggal | 4,84% | 3,23% | 1,61% | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.83% |
|  |  |  | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.84% |
|  |  |  | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.80% |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP | 70,28 | 70.35 | 71,00 | 71,25 | 72 | 73 |

### 2.1.1 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program­-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **SASARAN** | **PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG** |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | 1. Program Penataan Desa :    * + 1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa :    * + 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat :    * + 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota :   Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD  Administrasi keuangan PD  Administrasi Umum PD  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

### **Strategi dan Arah Kebijakan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan strategi peningkatan PKK aktif, Peningkatan posyandu, Peningkatan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Peningkatan jumlah unit usaha BUMDes dan peningkatan BUMDesa.
2. Sasaran strategis meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa dengan strategi meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan strategi pemenuhan dokumen perencanaan sesuai ketentuan, penguatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, penguatan tindak lanjut hasil monitoring, dan penguatan laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan arah kebijakan penguatan pengurus PKK, penguatan pengurus posyandu, Penguatan Tugas dan Fungsi Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Penguatan pembentukan unit usaha BUMDes dan penguatan BUMDesa.
2. Sasaran strategis meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa dengan arah kebijakan penguatan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan arah kebijakan peningkatan kualitas perencanaan sesuai ketentuan, peningkatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, peningkatan tindak lanjut hasil monitoring, dan peningkatan kualitas laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

**2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran.

Sesuai hasil pendampingan dari Kemenpan dimana berdasarkan PermanPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam penyusunan kinerja harus dimulai dengan penetapan sasaran kinerja yang ingin dicapai OPD (Outcome) dan selanjutnya mengidentifikasi faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan (CSF) dan menguraikan CSF tersebut atau hal-hal yang dapat mendukung untuk pencapaian sasaran OPD tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penyusunan Perjanjian kinerja yang berbasis kinerja (Pohon Kinerja). Penyusunan PK 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada PermanPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan Renstra, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, IKU dan anggaran.

Berikut ini Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| 1 | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | 8,87% |
| 2 | Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) | 0.71% |
| Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) | 0,70% |
| Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) | 0,71% |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP | 71.00 |

**Program/ Kegiatan Anggaran Ket**

1. Program Penataan Desa Rp. 44.873.160.00,- APBD
2. Program Administrasi Pemerintahan Rp. 791.552.400.00,- APBD

Desa

1. Program Pemberdayaan Lembaga Rp. 1.123.546.830.00,- APBD
2. Program Penunjang Urusan Rp. 3.649.193.601.00,- APBD

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Total Pagu Rp. 5.609.165.991.00,-**

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

**Tabel 2.5**

**Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **PENJELASAN** |
| **1** | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | * yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan kualitas pembangunan pada 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. * Peningkatan kualitas Pembangunan desa juga meningkatkan kemandirian desa sebagai pencapaian positif sebagai Upaya meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat desa. |
| **NO.** | **INDIKATOR KINERJA** | **PENJELASAN** |
| 1 | Persentase meningkatnya desa mandiri | * Kualitas pembangunan desa dipengaruhi oleh perkembangan status desa mandiri. Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur   yang memadai, aksebilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik |
| **NO.** | **TARGET** | **PENJELASAN** |
| 1 | 8,87% | * Target Persentase meningkatnya desa mandiri diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2022 capaian Persentase meningkatnya desa mandiri 8,06% atau 10 desa mengalami peningkatan status mandiri dan tahun 2023 DPMD berupaya meningkatkan nilai kenaikan skor Indeks Desa Membangun untuk mencapai status desa mandiri. * Persentase meningkatnya desa mandiri di tahun 2023 di targetkan 8.87% atau 11 desa yang akan ditingkatkan status mandiri dari 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%. * Penetapan target kinerja persentase desa mandiri setiap tahun, direncanakan 2 desa mengalami peningkatan status. |
| **NO** | **SASARAN** | **PENJELASAN** |
| 2. | Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | * Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan 3 (tiga) pilar utama yaitu pengukuran kesejahteraan masyarakat desa dan Pembangunan desa (indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan) * Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa dapat diartikan laju pertumbuhan Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan yang setiap tahun terjadi disebabkan karena indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. |
| **NO.** | **INDIKATOR KINERJA** | **PENJELASAN** |
| 1. | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) | * Salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa sebagai upaya pencapaian desa mandiri. |
| 2. | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) | Salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa sebagai upaya pencapaian desa mandiri. |
| 3. | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) | * Salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa sebagai upaya pencapaian desa mandiri. |
| **NO.** | **TARGET** | **PENJELASAN** |
| 1. | 0.71 | Target IKS DPMD diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 DPMD berupaya meningkatkan nilai kenaikan skor Indeks Desa Membangun untuk mencapai status desa mandiri. |
| 2. | 0.70 | Target IKE DPMD diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 DPMD berupaya meningkatkan nilai kenaikan skor Indeks Desa Membangun untuk mencapai status desa mandiri. |
| 3. | 0.71 | Target IKL DPMD diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 DPMD berupaya meningkatkan nilai kenaikan skor Indeks Desa Membangun untuk mencapai status desa mandiri. |
| **NO** | **SASARAN** | **PENJELASAN** |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sakip adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.  Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja |
| **NO.** | **INDIKATOR KINERJA** | **PENJELASAN** |
| 1. | Nilai SAKIP | Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instasi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD |
| **NO.** | **TARGET** | **PENJELASAN** |
| 1. | 73.35 | Target yang ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, tahun 2022 capaian Lakip hasil evaluasi Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 73.35 sehingga sebagai komitmen mendukung target Kabupaten maka pada tahun 2023 DPMD meningkatkan target capaian. |

Perjanjian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 mengalami perubahan. Perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2023 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansu Pemerintah. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan revisi adalah :

1. Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis atau indikator kinerja tersebut belum SMART sehingga dilakukan perbaikan.
2. Penambahan kinerja pada sasaran “meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan Masyarakat desa” untuk mengukur capaian kinerja.
3. Perbaikan indikator kinerja “nilai SAKIP” untuk mengukur akuntabilitas kinerja OPD.
4. Terjadinya perubahan anggaran, sehingga membutuhkan penyesuaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

### **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan IKU yang menjadi pedoman dalam upaya mencapai kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026

(Permenpan Nomor 89 Tahun 2021)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULASI | Penanggungjawab |
| 1 | Meningkatkan kemandirian pembangunan desa |  | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | Jumlah Desa tertinggal dibagi jumlah desa dikali 100 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Peningkatan jumlah status desa mandiri dari proses pembangunan desa | Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Masyarakat Desa | Σ Nilai IKS seluruh Desa  Jumlah Desa |
|  |  | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Masyarakat Desa | Σ Nilai IKE seluruh Desa  Jumlah Desa |
|  |  |  | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Masyarakat Desa | Σ Nilai IKL seluruh Desa  Jumlah Desa |

Berdasarkan pemahaman diatas maka IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa 2021-2026 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN** | **PENJELASAN** | **SUMBER DATA** |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | * Persentase meningkatnya desa mandiri | * Jumlah Desa tertinggal dibagi jumlah desa dikali 100 % | * Kualitas pembangunan desa dipengaruhi oleh perkembangan status desa mandiri. Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksebilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik | * Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa * OPD terkait * Data Desa |
| Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | * Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | * Memiliki ketersediaan sarana kesehatan, Ketersediaan layanan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan layanan tenaga kesehatan dokter, Akses ke Poskesdes/Polindes dan Posyandu, Tingkat kepersertaan BPJS/JKN/KIS, Akses Pendidikan, Kesejahteraan sosial, fasilitasi permukiman. * Persentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri yaitu antara 0.8169 s.d 0.9248   Σ Nilai IKS seluruh Desa  Jumlah Desa | * Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa dipengaruhi oleh Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Indikator IKS dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek IKS menjadi kekuatan saling mengisi, menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. * Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri | * Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa * OPD terkait * Data Desa |
|  | * Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) | * Memiliki keragaman produksi (jumlah industri mikro), Ketersediaan Pasar, Lembaga ekonomi, ketersediaan moda transportasi umum, kualitas jalan, keterbukaan wilayah. * Persentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri yaitu antara 0.8480 s.d 0.8936   Σ Nilai IKE seluruh Desa  Jumlah Desa | * Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa dipengaruhi oleh Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE). Indikator IKE dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek IKE menjadi kekuatan saling mengisi, menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. * Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri |  |
|  | * Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKL) | * Memiliki Kualitas Lingkungan tidak tercemar di Desa (air, udara, tanah, limbah disungai), Rawan Bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan), Tanggap Bencana/Fasilitasi mitigasi (peringatan dini bencana alam, peringatan dini stunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi)   Σ Nilai IKLseluruh Desa  Jumlah Desa | * Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa dipengaruhi oleh Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indikator IKL dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek IKL menjadi kekuatan saling mengisi, menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. * Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri |  |

2.5 **Rencana Anggaran**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P), anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 mengalami penambahan sebesar **Rp. 720.570.000,-** dimana anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 4.888.595.991,-** dan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 5.609.165.991,-***,* terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.935.389.751,-** belanja barang dan jasa **Rp. 3.277.032.640,-** belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp. 164.608.600,-** dan belanja modal Gedung dan Bangunan **Rp 227.135.000,-.** dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun program dan anggaran APBD Perubahan secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.7**

Program dan Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM | ANGGARAN  (Rp) | Ket |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 3.649.193.601,- |  |
| 2 | Program Penataan Desa | 44.873.160,- |  |
| 3 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 791.552.400,- |  |
| 4 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat | 1.123.546.830,- |  |
| JUMLAH | | **5.609.165.991,-** |  |

Alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel

Alokasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR** | **ANGGARAN (Rp)** |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | Rp. 4.485.619.161,- |
| Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa |
| Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa |
| Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP | Rp. 3.649.193601,- |

*Sumber : DPA Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA. 2023*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 2 (dua) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran, dan untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut DPMD menetapkan 5 (lima) indikator. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan, DPMD didukung 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh anggaran belanja yang ada yaitu sebesar **Rp**. **5.609.165.991,-** digunakan untuk sepenuhnya mendukung sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa”, “Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa”** dan “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BAB 3** | AKUNTABILITASKINERJA |  |

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk:

a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisai terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.

b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.

c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.

d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.

e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi ”reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

Skala Nilai Peringkat Kinerja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA** | **KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA** |
| 1. | 91 ≤ 100 % | Sangat Tinggi |
| 2. | 76 ≤ 90 % | Tinggi |
| 3. | 66 ≤ 75 % | Sedang |
| 4. | 51 ≤ 65 % | Rendah |
| 5. | ≤ 50 % | Sangat Rendah |

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

* 1. **Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur**

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur

Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Predikat Kinerja |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | Persen | 8,87% | 19.20% | 216.46 | ST |
| 2. | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | Poin | 0.71 | 0.74 | 104.22 | ST |
|  |  | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | Poin | 0.70 | 0.50 | 71.43 | T |
|  |  | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | Poin | 0.71 | 0.69 | 97.18 | ST |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP  (n-1) | Nilai | 70,35 | 73.35 | 104 | ST |

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja (4 indikator kinerja utama – IKU) yang diperjanjikan di Tahun 2023,

* 1. **Analisis Capaian Kinerja**

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS I**

**“MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA”**

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Meningkatnya Desa Mandiri, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Target Terhadap Realisasi

Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | Persen | 8.87 | 19.20 | 216.46 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 216.46 (Sangat Tinggi) | | |

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri

Pada Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | Persen | 8.87 | 19.20 | 216.46 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 216.46 (Sangat Tinggi) | | |

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Presentase Meningkatnya Desa Mandiri,** target yang ditetapkan 8.87% dan terealisasi 19.20%, dimana peningkatan status desa mandiri yang ditargetkan 11 desa meningkat menjadi 24 desa mandiri. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari *website* resmi IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada *link* [*https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/4/peraturan-perundang-undangan-dan-hasil-pengolahan-data-idm*](https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/4/peraturan-perundang-undangan-dan-hasil-pengolahan-data-idm)*.* dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2023.

Tabel 3.5

Desa Mandiri Yang Mengalami Peningkatan Status

di Kabupaten Luwu Timur Pada Tahun 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA KECAMATAN** | **NAMA DESA** | **NILAI IDM 2023** | **STATUS IDM 2023** |
| 1 | MANGKUTANA | WONOREJO | 0.8781 | MANDIRI |
| 2 | MANGKUTANA | WONOREJO TIMUR | 0.884 | MANDIRI |
| 3 | NUHA | NIKKEL | 0.8343 | MANDIRI |
| 4 | NUHA | SOROWAKO | 0.8381 | MANDIRI |
| 5 | TOWUTI | TIMAMPU | 0.8508 | MANDIRI |
| 6 | TOWUTI | WAWONDULA | 0.9144 | MANDIRI |
| 7 | TOWUTI | LANGKEA RAYA | 0.8256 | MANDIRI |
| 8 | TOWUTI | BARUGA | 0.924 | MANDIRI |
| 9 | TOWUTI | ASULI | 0.8221 | MANDIRI |
| 10 | MALILI | LASKAP | 0.8492 | MANDIRI |
| 11 | MALILI | MANURUNG | 0.8229 | MANDIRI |
| 12 | MALILI | BARUGA | 0.8673 | MANDIRI |
| 13 | MALILI | LAKAWALI | 0.9105 | MANDIRI |
| 14 | MALILI | BALANTANG | 0.8378 | MANDIRI |
| 15 | MALILI | PUNCAK INDAH | 0.9381 | MANDIRI |
| 16 | MALILI | LAKAWALI PANTAI | 0.839 | MANDIRI |
| 17 | WOTU | BAWALIPU | 0.8786 | MANDIRI |
| 18 | BURAU | BURAU | 0.834 | MANDIRI |
| 19 | BURAU | JALAJJA | 0.8432 | MANDIRI |
| 20 | TOMONI | MULYASRI | 0.8189 | MANDIRI |
| 21 | TOMONI | BERINGIN JAYA | 0.8219 | MANDIRI |
| 22 | TOMONI | BANGUN JAYA | 0.8283 | MANDIRI |
| 23 | TOMONI | MANDIRI | 0.9014 | MANDIRI |
| 24 | KALAENA | KALAENA KIRI | 0.933 | MANDIRI |

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2019 -2023)**

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2019 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri

Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun

(2019 – 2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
| Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | Persen | 2019 | 1.61 | 0.81 | 50.31 |
| 2020 | 4.03 | 1.63 | 39.96 |
| 2021 | 5.65 | 5.69 | 100.7 |
| 2022 | 7.26 | 8.06 | 111.01 |
| 2023 | 8.87 | 19.20 | 216.46 |

Pengukuran kinerja dari tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan kinerja Presentase Meningkatnya Desa Mandiri dapat dilihat dari tabel diatas. Pada tahun 2019 diperoleh realisasi 0.81% atau 1 desa mandiri dari target 1.61% atau 2 desa, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah status desa mandiri dengan realisasi 1.63% atau 2 desa mandiri, pada tahun 2021 realisasi 5.69% atau 7 desa mandiri, 2022 diperoleh realisasi 8.06% atau 10 desa mandiri dari target 8.87% atau 11 desa mandiri sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 90.07%. Dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan dari target 8.06% atau 10 desa mandiri menjadi 19.20% atau 24 desa mandiri dimana skoring desa IDM tertinggi 0,93381 desa Puncak Indah Kecamatan Malili dan skoring desa IDM yang terendah 0,8189 Desa Mulyasari Kecamatan Tomoni.

Peningkatan ini merupakan indikasi positif dimana semakin banyak desa statusnya meningkat.

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target RPJMD/Renstra 2021-2026 | Realisasi Tahun 2023 | Presentase Capaian Kinerja |
| Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | 13,71 | 19.20 | 140.04 |

Indikator Persentase meningkatnya desa mandiri pada tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 19.20% atau 24 desa mandiri, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan telah melampui target akhir jangka menengah. Hal ini mengindikasikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah pada jalur yang tepat dalam mencapai target RPJMD/Renstra 2021-2026.

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain**

Salah satu cara untuk mengetahui Tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Presiden Republik Indonesia dalam Visi dan Misinya menekankan Penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada 4 (empat) aspek, yakni :

1. Kegiatan yang efisiensi dan efektif
2. Keandalan laporan keuangan
3. Pengamanan asset
4. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Ke-4 aspek tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Dimana pada aturan tersebut mengutamakan *hard control, soft control* tidak tersentuh (Integritas, Komitmen, Kepemimpinan dan Nilai Etika).

Mengenai perbandingan antara realisasi kinerja Dinas dan Standar Nasional Lainnya, tidak kami dapati indikator pembanding yang setara untuk dilakukan Analisa Perbandingan. Namun, melihat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dapat disandingkan antara indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yakni :

**Tabel 3.8**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian daerah Lain**

**Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| 1 | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Persentase Desa Mandiri | 43.80% (53 Desa) | 44.63% (54 Desa) | 101.89% |

1. **Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis : **Meningkatnya kualitas pembangunan desa**
2. Persentase meningkatnya desa mandiri yaitu : 19.20% atau 24 desa mandiri, hal ini dikategorikan **berhasil** dan telah tercapai 216,46% lebih dari target yang ditentukan yaitu 8,87% atau 11 desa.

* Tercapainya target persentase meningkatnya desa mandiri didukung dengan ketersediaan anggaran serta adanya inisiatif dari Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan status desa, dengan melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan tolak ukur variabel Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun sebelumnya untuk lebih baik di tahun berikutnya.
* Selain keberhasilan, kegagalan/hambatan juga ditemui dalam proses tercapainya target, diantaranya yaitu :
* Kurangnya partisipasi stakeholder dalam Pembangunan desa dalam upaya mendukung desa dalam pemenuhan tolak ukur variabel Indeks Desa Membangun (IDM).
* Kurangnya SDM Pemerintah Desa dalam pemenuhan variabel IDM yang diperlukan.

1. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.9

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator kinerja** | **Capaian** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realsiasi** | **Capaian** | **Rencana Tindak Lanjut** |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase Meningkatnya Desa Mandiri | 19.20%  (24 desa mandiri) =  (216.46%) | Penataan Desa | Persentase peningkatan penataan desa | **75%** | **87.32%** | **116%** | Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024 |
| Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa | **75%** | **80%** | **107%** |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna | 65% | 80.65% | 124% |

1. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

* Sasaran strategis 1 : **Meningkatnya kualitas pembangunan desa**

Indikator Kinerja Persentase meningkatnya desa mandiri dengan target 8,87% atau 11 desa telah berhasil terealisasi sebesar 19.20% atau 24 desa mandiri, dengan capaian 216,46%.

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat..

1. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 yaitu :

1. Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan stakeholder terkait atas pemenuhan variabel IDM yang masih kurang.
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama Tim Pendamping Desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan status desa mandiri.
3. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi dalam melakukan kegiatannya. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Efisiensi adalah ukuran Tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.959.972.390,- dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Presentase Meningkatnya Desa Mandiri,** terealisasi sebesar Rp. 1.802.341.072,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

Jumlah Realisasi Anggaran

= 100% - x 100%

Jumlah Alokasi Anggaran

= 100% - 1.802.341.072 x 100%

1.959.972.390

= 100% - 91.96%

= **8.04% Efisiensi Anggaran**

**SASARAN STRATEGIS II**

**“MENINGKATNYA INDEKS KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DESA”**

**”**

**Indikator 1 :**

**Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa**

Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa, Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa dan Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa. Capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

Target Terhadap Realisasi

Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | Poin | 0.71 | 0.74 | 104.23 |
| 2 | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | Poin | 0.70 | 0.50 | 71.43 |
| 3 | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa | Poin | 0.71 | 0.69 | 97.18 |
| Capaian Kinerja | | | 272.84/3 | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 90.95% | | |

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

**Indikator 1 : Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa**

1. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Capaian Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa

Pada Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | Poin | 0.71 | 0.74 | 104.23 |

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa,** target yang ditetapkan 0.71 dan terealisasi 0.74. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memajukan desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari *website* resmi IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada *link* [*https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/4/peraturan-perundang-undangan-dan-hasil-pengolahan-data-idm*](https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/4/peraturan-perundang-undangan-dan-hasil-pengolahan-data-idm)*.* dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Sistem Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

Capaian Indikator Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa

Nilai status Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) diukur dengan dengan jumlah nilai Indeks Ketahanan Sosial se Kabupaten Luwu Timur dibagi Jumlah Desa.

IKS = Σ Nilai IKS seluruh Desa

Jumlah Desa

= 21.544

29

= 0.74

Pada tahun 2023 memperoleh nilai 0.74 poin

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir**

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2019 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Capaian Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa

Target Terhadap Realisasi selama 2 (dua) Tahun

(2022 – 2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | Persen | 2022 | 0.70 | 0.70 | 100 |
| 2023 | 0.71 | 0.74 | 104.22 |

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target RPJMD/Renstra 2021-2026 | Realisasi Tahun 2023 | Presentase Capaian Kinerja |
| Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | 0.83 | 0.74 | 89.16 |

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan target dan realisasi standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14

Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Standar Nasional | |
| Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
| 1. | Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Eonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | 0.74 | - | - |

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sasaran sasaran strategis meningkatnya indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa dengan indikator kinerja Indeks ketahanan sosial masyarakat desa tidak mengikuti standar nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

1. **Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa**

* Indeks Ketahanan Sosial yaitu : 0,74 poin, dengan capaian 104.23% hal ini dikategorikan **sangat memuaskan**/**berhasil** telah tercapai.
* Target dapat tercapai dengan adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan pendataan secara rutin, Ini tergantung pada SKPD lain yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang berkaitan dengan IKS.

1. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.15

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator kinerja** | **Capaian** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realsiasi** | **Capaian** | **Rencana Tindak Lanjut** |
| Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Eonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | 104.23 | Penataan Desa | Persentase peningkatan penataan desa | **75%** | **87.32%** | **116%** | Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024 |
| Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa | **75%** | **80%** | **107%** |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna | 65% | 80.65% | 124% |

Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran strategis 2 : **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa.**

Indikator 1 :

Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dengan target 0.71% telah berhasil terealisasi sebesar 0.74% capaian 104.23%.

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 yaitu :

1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama Tim Pendamping Desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan capaian 3 variabel IDM (IKS, IKE dan IKL)
2. Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan *stakeholder* terkait atas pemenuhan 3 variabel IDM yang masih kurang.
3. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.959.972.390,- dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa,** terealisasi sebesar Rp. 1.802.341.072,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

Jumlah Realisasi Anggaran

= 100% - x 100%

Jumlah Alokasi Anggaran

= 100% - 1.802.341.072 x 100%

1.959.972.390

= 100% - 91.96%

= **8.04% Efisiensi Anggaran**

**Indikator 2 : Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa**

**Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.16**

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa

Pada Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | Poin | 0.70 | 0.50 | 71.43 |

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa,** target yang ditetapkan 0.70 poin dan terealisasi 0.50 poin. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari *website* resmi IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada *link* [*https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/4/peraturan-perundang-undangan-dan-hasil-pengolahan-data-idm*](https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/4/peraturan-perundang-undangan-dan-hasil-pengolahan-data-idm)*.* dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Sistem Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

Capaian Indikator Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa

Nilai status Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) diukur dengan dengan jumlah nilai Indeks Ketahanan Sosial se Kabupaten Luwu Timur dibagi Jumlah Desa.

IKS = Σ Nilai IKE seluruh Desa

Jumlah Desa

= 5.968

12

= 0.50

Pada tahun 2023, IKE memperoleh nilai 0.50 poin

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir**

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur selama 2 (dua) tahun berturut-turut (2022 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17

Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa

Target Terhadap Realisasi selama 2 (dua) Tahun

(2022 – 2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | Poin | 2022 | 0.70 | 0.50 | 71.43 |
| 2023 | 0.70 | 0.50 | 71.43 |

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target RPJMD/Renstra 2021-2026 | Realisasi Tahun 2023 | Presentase Capaian Kinerja |
| Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | 0.84 | 0.50 | 59.52 |

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan target dan realisasi standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.19

Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Standar Nasional | |
| Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
| 1. | Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | 0.50 | - | - |

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sasaran sasaran strategis meningkatnya indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa dengan indikator kinerja Indeks ketahanan sosial masyarakat desa tidak mengikuti standar nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

1. **Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa**

* Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu : 0,50 poin, dengan capaian 71.43 poin hal ini dikategorikan **memuaskan**/**berhasil** telah tercapai.
* Target dapat tercapai dengan adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan pendataan secara rutin, Ini tergantung pada SKPD lain yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang berkaitan dengan IKE.

1. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.20

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator kinerja** | **Capaian** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realsiasi** | **Capaian** | **Rencana Tindak Lanjut** |
| Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Eonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | 104.23 | Penataan Desa | Persentase peningkatan penataan desa | **75%** | **87.32%** | **116%** | Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024 |
| Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa | **75%** | **80%** | **107%** |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna | 65% | 80.65% | 124% |

1. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran strategis 2 : **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa.**

Indikator 2 :

Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dengan target 0.70% telah berhasil terealisasi sebesar 0.74% capaian 104.23%.

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

1. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 yaitu :

1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama Tim Pendamping Desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan capaian 3 variabel IDM (IKS, IKE dan IKL)
2. Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan *stakeholder* terkait atas pemenuhan 3 variabel IDM yang masih kurang.
3. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.959.972.390,- dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa,** terealisasi sebesar Rp. 1.802.341.072,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

Jumlah Realisasi Anggaran

= 100% - x 100%

Jumlah Alokasi Anggaran

= 100% - 1.802.341.072 x 100%

1.959.972.390

= 100% - 91.96%

= **8.04% Efisiensi Anggaran**

**Indikator 3 : Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa**

1. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa

Pada Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa | Poin | 0.71 | 0.69 | 97.18 |

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa,** target yang ditetapkan 0.71 poin dan terealisasi 0.69 poin. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari *website* resmi IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada *link* [*https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/4/peraturan-perundang-undangan-dan-hasil-pengolahan-data-idm*](https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/4/peraturan-perundang-undangan-dan-hasil-pengolahan-data-idm)*.* dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Sistem Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

Capaian Indikator Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa

Nilai status Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKS) diukur dengan dengan jumlah nilai Indeks Ketahanan Sosial se Kabupaten Luwu Timur dibagi Jumlah Desa.

IKS = Σ Nilai IKL seluruh Desa

Jumlah Desa

= 2.08

3

= 0.69

Pada tahun 2023, IKL memperoleh nilai 0.69 poin

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir**

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur selama 2 (dua) tahun berturut-turut (2022 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.22

Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa

Target Terhadap Realisasi selama 2 (dua) Tahun

(2022 – 2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | Poin | 2022 | 0.71 | 0.69 | 97.18 |
| 2023 | 0.71 | 0.69 | 97.18 |

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Capaian Indikator Kinerja Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target RPJMD/Renstra 2021-2026 | Realisasi Tahun 2023 | Presentase Capaian Kinerja |
| Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa | 0.80 | 0.69 | 86.25 |

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan target dan realisasi standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.24

Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Standar Nasional | |
| Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
| 1. | Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa | 0.69 | - | - |

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sasaran sasaran strategis meningkatnya indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa dengan indikator kinerja Indeks ketahanan lingkungan masyarakat desa tidak mengikuti standar nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

1. **Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa**

* Realisasi Indeks Ketahanan Lingkungan yaitu : 0,69 poin, dengan capaian 97.18 poin hal ini dikategorikan **sangat** **memuaskan**/**berhasil** telah tercapai.
* Target dapat tercapai dengan adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan pendataan secara rutin, Ini tergantung pada SKPD lain yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang berkaitan dengan IKL.

1. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.25

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator kinerja** | **Capaian** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realsiasi** | **Capaian** | **Rencana Tindak Lanjut** |
| Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Eonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa | 104.23 | Penataan Desa | Persentase peningkatan penataan desa | **75%** | **87.32%** | **116%** | Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024 |
| Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa | **75%** | **80%** | **107%** |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna | 65% | 80.65% | 124% |

1. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran strategis 2 : **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa.**

Indikator 3 :

Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa dengan target 0.71% telah berhasil terealisasi sebesar 0.69 poin dengan capaian 97.18 poin.

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

1. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 yaitu :

1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama Tim Pendamping Desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan capaian 3 variabel IDM (IKS, IKE dan IKL)
2. Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan *stakeholder* terkait atas pemenuhan 3 variabel IDM yang masih kurang.
3. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.959.972.390,- dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa,** terealisasi sebesar Rp. 1.802.341.072,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

Jumlah Realisasi Anggaran

= 100 x 100%

Jumlah Alokasi Anggaran

= 100% - 1.802.341.072 x 100%

1.959.972.390

= 100% - 91.96%

= **8.04% Efisiensi Anggaran**

**SASARAN STRATEGIS III**

**“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA”**

**”**

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.26

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Target Terhadap Realisasi

Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | | |
| Target | | Realisasi | Capaian |
| 1 | Nilai Sakip (n-1) | Nilai | 70.38 | | 73.35 | 104 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | 104 | | | |

*Sumber : LHE Evaluasi Lakip Tahun 2022*

Analisis capaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa’** berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

**Indikator Kinerja**

**NILAI SAKIP (n-1)**

1. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.27**

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Nilai SAKIP (n-1) | Nilai | 70.38 | 73.35 | 104 |

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja da Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 73.35 dengan kategori BB, dengan rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.28

Komponen Penilaian Kinerja

Terhadapa Dokumen LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPD** | **Komponen Dinilai** | **Bobot** | **Nilai** |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 24.60 |
| Pengukuran Kinerja | 30.00 | 20.10 |
| Pelaporan Kinerja | 15.00 | 9.90 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 18.75 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 73.35 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | BB |

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2019-2023)**

Capaian Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun (2019-2023), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29

Nilai dan Kategori SAKIP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2019-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Kategori | Capaian Kinerja |
| Nilai SAKIP | Nilai | 2019 | 60.00 | 65.58 | B | 109,30 |
| 2020 | 65.00 | 65.58 | B | 101.01 |
| 2021 | 70.28 | 70.16 | BB | 99.83 |
| 2022 | 70.35 | 73.35 | BB | 104 |
| 2023 | 71.00 | 73.35 | BB | 103 |

*Sumber : Renstra dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

1. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)**

Capaian Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dibandingkan Target Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026/Renstra 2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.30

Capaian Indikator Kinerja Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | |
| **Indikator Kinerja** | **Target RPJMD/Renstra 2021-2026** | **Realisasi Tahun 2022** | **Presentase Capaian Kinerja** |
| Nilai SAKIP | 70.35 | 73.35 | 104 |

*Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi dan Capaian Kinerja belum mencapai atau melebihi target Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan rekomendasi perbaikan pada LHP Nomor 700/121-15/VIII/2023 Tanggal 04 Agustus 2023 antara lain :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja seharusnya menggambarkan hubugan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai si setiap level jabatan, target kinerja kepala bidang disupport oleh target kinerja level dibawahnya sampai staf.
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agae memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pada Kasubag. Perencanaan.
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, dari hasil pengukuran memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Agar Kepala Dinas sebagai pengambil Keputusan (Decision Maker) terlibat langsung dalam mengukur capaian kinerja bawahannya dan pejabat dibawahnya melakukan hal yang sama kepada staf.
5. Pengukuran kinerja sebaiknya mempengaruhi penyesuain kebijakan dalam mencapai kinerja.
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
7. Membuat Perkada tentang tunjangan kinerja dan mekanisme pembayaran Tukin yang kaitannya dengan capaian kinerja.
8. Membuat pedoman pola mutasi/rotasi (terdapat penjelasan mutase dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya (BKPSDM).
9. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dengan narasi yang memadai.
10. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmarking Kinerja)
11. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dengan rekomendasi perbaikan kinerja.
12. Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
13. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
14. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
15. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2023, Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan nilai 81.35 dengan predikat A. Nilai SAKIP antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih nilai sebesar 8. Namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP dimasa yang akan datang.

Tabel 3.31

Perbandingan Nilai SAKIP

DPMD Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan dengan

DPMD Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan

Tahun 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nilai SAKIP DPMD Kab. Gowa** | **Nilai SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur** | **Selisih** | **Presentase Capaian SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur Terhadap SAKIP DPMD Kab. Gowa** |
| 81.35 | 73.35 | 8 | 110.90 |

1. **Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keselarasan antara dokumen perencanaan harus tetap dijaga dan diperhatikan yaitu antara dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA dan LAKIP.

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Asset Perangkat Daerah

Pengelolaan asset perangkat daerah dipengaruhi oleh laporan pengelolaan asset yang disusun setiap bulannya.

1. Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Pelaporan

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan.

1. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Indikator kinerja ini di dukung oleh 1 Program, 8 Kegiatan dan 25 sub kegiatan, Dari 100% target kinerja yang ditetapkan terealisasi 97,39%. Adapun Program yang mendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.442.509.841 dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.350.934.971,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

Jumlah Realisasi Anggaran

= 100% - x 100%

Jumlah Alokasi Anggaran

= 100% - 2.350.934.971 x 100%

2.442.509.841

= 100% - 96.00%

= **4.00% Efisiensi Anggaran**

* 1. **Akuntabilitas Keuangan**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 94.21% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.609.165.991,-

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **PROGRAM / KEGIATAN** | **JUMLAH ANGGARAN** | | **REALISASI** | |
| **ANGGARAN POKOK** | **ANGGARAN PERUBAHAN** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  |  |  |  |  | **(6/5\*100)** |
|  | **BELANJA** | **4,430,787,841.00** | **5,609,165,991.00** | **5,284,270,439.00** | **94.21** |
| **1** | **Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | **3,416,059,706.00** | **3,649,193,601.00** | **3,481,929,367.00** | **95.42** |
|  | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota** | **3,416,059,706.00** | **3,649,193,601.00** | **3,481,929,367.00** | **95.42** |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **89,935,650.00** | **113,695,650.00** | **84,741,505.00** | **74.53** |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 42,299,800.00 | 42,299,800.00 | 33,778,820.00 | 79.86 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,522,750.00 | 3,522,750.00 | 3,400,000.00 | 96.52 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3,654,000.00 | 3,654,000.00 | 3,538,000.00 | 96.83 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40,459,100.00 | 64,219,100.00 | 44,024,685.00 | 68.55 |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2,478,452,656.00** | **1,967,895,551.00** | **1,928,556,319.00** | **98.00** |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,419,606,856.00 | 1,887,989,751.00 | 1,851,089,989.00 | 98.05 |
|  | Koordinasi & Peny Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 58,845,800.00 | 79,905,800.00 | 77,466,330.00 | 96.95 |
|  | **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **16,184,300.00** | **16,184,300.00** | **15,970,985.00** | **98.68** |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 16,184,300.00 | 16,184,300.00 | 15,970,985.00 | 98.68 |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **74,037,000.00** | **141,359,000.00** | **81,169,259.00** | **57.42** |
|  | Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4,047,000.00 | 18,907,000.00 | 16,385,830.00 | 86.67 |
|  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25,100,000.00 | 17,830,000.00 | 9,500,000.00 | 53.28 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 44,890,000.00 | 104,622,000.00 | 55,283,429.00 | 52.84 |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **399,333,300.00** | **694,685,300.00** | **683,406,801.00** | **98.38** |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,538,350.00 | 12,538,350.00 | 12,533,400.00 | 99.96 |
|  | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,036,100.00 | 96.96 |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10,498,550.00 | 10,498,550.00 | 10,468,400.00 | 99.71 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | 7,015,600.00 | 7,015,600.00 | 6,878,140.00 | 98.04 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12,780,000.00 | 12,780,000.00 | 12,660,000.00 | 99.06 |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25,335,000.00 | 25,335,000.00 | 25,170,500.00 | 99.35 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 339,065,800.00 | 624,417,800.00 | 613,660,261.00 | 98.28 |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **69,706,600.00** | **392,543,600.00** | **379,841,698.00** | **96.76** |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 69,706,600.00 | 165,408,600.00 | 154,292,000.00 | 93.28 |
|  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 227,135,000.00 | 225,549,698.00 | 99.30 |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **142,610,200.00** | **161,820,200.00** | **159,196,300.00** | **98.38** |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,856,200.00 | 20,596,200.00 | 19,750,300.00 | 95.89 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik | 74,754,000.00 | 78,224,000.00 | 76,446,000.00 | 97.73 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 100.00 |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **145,800,000.00** | **161,010,000.00** | **149,046,500.00** | **92.57** |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 69,300,000.00 | 95,200,000.00 | 84,186,500.00 | 88.43 |
|  | Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya | 25,500,000.00 | 14,810,000.00 | 13,860,000.00 | 93.59 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 100.00 |
| **2** | **Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan Desa** | **706,509,155.00** | **836,425,560.00** | **781,708,362.00** | **93.46** |
|  | **Program Penyelenggaraan Penataan Desa** | **20,328,060.00** | **44,873,160.00** | **41,429,647.00** | **92.33** |
|  | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 20,328,060.00 | 44,873,160.00 | 41,429,647.00 | 92.33 |
|  | **Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **686,181,095.00** | **791,552,400.00** | **740,278,715.00** | **93.52** |
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 10,654,395.00 | 10,655,600.00 | 10,394,000.00 | 97.54 |
|  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 127,214,150.00 | 127,214,150.00 | 119,586,990.00 | 94.00 |
|  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 34,267,600.00 | 38,372,600.00 | 37,310,050.00 | 97.23 |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | 58,205,500.00 | 169,442,400.00 | 159,773,150.00 | 94.29 |
|  | Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 170,634,000.00 | 170,634,000.00 | 147,964,500.00 | 86.71 |
|  | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 23,736,650.00 | 23,736,650.00 | 21,895,320.00 | 92.24 |
|  | Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa | 38,281,200.00 | 54,931,200.00 | 53,517,660.00 | 97.43 |
|  | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 84,476,800.00 | 57,855,000.00 | 54,418,750.00 | 94.06 |
|  | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 138,710,800.00 | 138,710,800.00 | 135,418,295.00 | 97.63 |
| **3** | **Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial da Lingkungan Masyarakat Desa** | **308,218,980.00** | **1,123,546,830.00** | **1,020,632,710.00** | **90.84** |
|  | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **308,218,980.00** | **1,123,546,830.00** | **1,020,632,710.00** | **90.84** |
|  | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 122,537,080.00 | 127,857,080.00 | 111,123,500.00 | 86.91 |
|  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 93,381,900.00 | 155,471,800.00 | 135,311,140.00 | 87.03 |
|  | Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 92,300,000.00 | 15,340,000.00 | 15,340,000.00 | 100.00 |
|  | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | ,m,2024-01-24 | 824,877,950.00 | 758,858,070.00 | 92.00 |
| **Total** | | **4,430,787,841.00** | **5,609,165,991.00** | **5,284,270,439.00** | **94.21** |

**Tabel 3.33**

**Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tahun Anggaran 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Belanja | Jumlah Anggaran setelah Perubahan | Realisasi | Persentase | Sisa | Persentase |
| *1* | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |  |  |
|  | **BELANJA** | **5.609.165.991** | **5.284.270.439** | **94.21** | **324.895.552** | **5.78** |
| 1 | **BELANJA OPERASI** | **5.212.422.391** | **4.899.928.741** | **94.00** | **312.494.250** | **6.38** |
|  | Belanja Pegawai | 1.935.389.751 | 1.030.172.413 | 53.23 | 905.217.338 | 87.87 |
|  | Belanja Barang dan Jasa | 3.277.032.640 | 3.003.838.752 | 91.66 | 273.193.888 | 9.09 |
| 2 | **BELANJA MODAL** | **396.743.600** | **384.341.698** | **96.87** | **2.401.9021** | **3.23** |
|  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 164.608.600 | 153.792.000 | 93.43 | 10.816.600 | 7.03 |
|  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 227.135.000 | 225.549.698 | 99.30 | 1.585.302 | 0.70 |
| Total | | **5.609.165.991** | **5.284.270.439** | **94.21** | **324.895.552** | **5.78** |

Tabel 3.34

Realisasi Keuangan, Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi Perbaikan

Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KODE REK | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN PERUBAHAN | | | | PERMASALAHAN /KENDALA | | SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN | |
| **PAGU** | **REALISASI** | **%** |  | |  | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| KODE REK | **BELANJA** | **5,609,165,991.00** | **5,284,270,439.00** | **94.21** |  | |  | |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **113,695,650.00** | **84,741,505.00** | **74.53** |  | |  | |
| 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 42,299,800.00 | 33,778,820.00 | 79.86 | Terdapat sisa belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp. 8.520.980,- yaitu anggaran belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.1.050.000,- disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas dan pengembalian gaji tenaga upah jasa untuk 1 orang yang mengundurkan diri mulai bulan agustus - desember serta 1 orang upah jasa yang lulus P3K dibulan November 2023 sebesar Rp. 7.000.000. Realisasi keuangan sampai TW 4 Rp. 33.778.820,- atau sebesar Rp. 79.86% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,522,750.00 | 3,400,000.00 | 96.52 | Terdapat sisa belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp. 122.750,- yaitu anggaran 1). belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 57.200,- 2). Belanja Bahan cetak sebesar Rp. 57.050,- 4). Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 8.500,-. Realisasi keuangan sampai TW 4 Rp. 3.400.000,- atau 96.52% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3,654,000.00 | 3,538,000.00 | 96.83 | Terdapat sisa belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp. 116.000,- yaitu anggaran 1). Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 13.500,- 2). belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 7.000,- 2). Belanja Bahan cetak sebesar Rp. 86.500,- 4). Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 9.000,-. Realisasi keuangan sampai TW 4 Rp. 3.538.000,- atau 96.83% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 64,219,100.00 | 44,024,685.00 | 68.55 | Terdapat sisa belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp.20.194.415,- yaitu anggaran 1). Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 74.400,- 2). Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 56.800,- 3). Belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 227.970,- 4). Belanja Bahan Komputer Rp. 25.500,- 5). belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 8.820.000,-,- disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas, dan 6). Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.989.745,- disiapkan untuk 2 (dua) orang pada kegiatan perencanaan di BPKP namun peserta dibatasi hanya untuk 1 orang/OPD. Realisasi keuangan sebesar Rp. 44.024.685,- atau 68.55% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1,967,895,551.00** | **1,928,556,319.00** | **98.00** |  | |  | |
| 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,887,989,751.00 | 1,851,089,989.00 | 98.05 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 36.899.762,- yaitu belanja gaji dan tunjangan lainnya yang sifatnya dipersiapkan apabila ada penambahan pegawai 1 orang untuk 3 bualn sebesar Rp. 18.277.338,- dan pengembalian TPP untuk ketidakdisiplinan pegawai selama Tahun 2023 sebesar Rp. 18.622.424,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.851.089.989 atau 98.05 | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.02.07 | Koordinasi & Peny Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 79,905,800.00 | 77,466,330.00 | 96.95 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.439.470,- yaitu 1). kelebihan penganggaran honor pengelola keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- 2). Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 20.600,- 3). Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 150.100,- 4). Belanja bahan komputer sebesar Rp. 34.000,-. Dianggarkan untuk honor PPK dan Bendahara pengeluaran dengan nilai pagu diatas 5 Milyar dan Belanja barang pakai habis untuk nego pejabat pengadaan yang lebih rendah dari penganggaran. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 77.466.330,- atau 96.95% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
|  | **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **16,184,300.00** | **15,970,985.00** | **98.68** |  | |  | |
| 2.13.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 16,184,300.00 | 15,970,985.00 | 98.68 | Terdapat sisa belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan Rp. 213.315,- yaitu anggaran 1). Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 9.250,- 2). belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 27.500,- 2). Belanja Bahan cetak sebesar Rp. 9.065,- 4). Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 42.500,- dan 5). Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 125.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 15.970.985 atau 98.68% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **141,359,000.00** | **81,169,259.00** | **57.42** |  | |  | |
| 2.13.01.2.05.03 | Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 18,907,000.00 | 16,385,830.00 | 86.67 | Terdapat sisa belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp. 2.521.170,- yaitu anggaran 1). Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 91.200,- 2). belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 126.300,- 2). Belanja Bahan cetak sebesar Rp. 170,- 4). Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 8.500,- dan 5). Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.295.000,- Disediakan perjalanan dinas kegiatan kepegawaian untuk 2 (dua) orang, namun peserta yang diminta 1 (satu) orang. Capaian Realisasi keuangan Rp. 16.385.830 atau 86.67% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 17,830,000.00 | 9,500,000.00 | 53.28 | Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp. 8.330.000,- adalah belanja perjalanan dinas. Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.500.000,- atau 53.28%. Pada dasarnya penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta. | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 104,622,000.00 | 55,283,429.00 | 52.84 | Terdapat sisa anggaran yang cukup besar Rp. 49.338.571,- adalah belanja biaya kontribusi Bimtek sebesar Rp. 14.600.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 34.738.571,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 55.283.429,- atau 52.84%. Pada dasarnya penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta. | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **694,685,300.00** | **683,406,801.00** | **98.38** |  | |  | |
| 2.13.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12,538,350.00 | 12,533,400.00 | 99.96 | Terdapat sisa anggaran belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp. 4.950,- yaitu anggaran belanja Alat Tulis Kantor. Realisasi keuangan Rp. 12.533.400,- atau 99.96% | |  | |
| 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | 2,100,000.00 | 2,036,100.00 | 96.96 | Terdapat sisa anggaran belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp. 63.900,- yaitu anggaran belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 61.400,- dan Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 2.500,-. Realisasi keuangan Rp. 2.036.100,- atau 96.96% | |  | |
| 2.13.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10,498,550.00 | 10,468,400.00 | 99.71 | Terdapat sisa belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan anggaran sebesar Rp. 30.150,- yaitu anggaran belanja Alat Tulis Kantor. Realisasi keaungan Rp. 10.468.400,- atau capaian kuangan sebesar Rp. 99.71% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | 7,015,600.00 | 6,878,140.00 | 98.04 | Terdapat sisa belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan anggaran sebesar Rp. 137.460,- yaitu anggaran belanja bahan cetak. Realisasi keuangan Rp. 6.878.140,- atau capaian keuangan 98.04% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12,780,000.00 | 12,660,000.00 | 99.06 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 120.000,- yaitu anggaran belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah. Realisasi keuangan Rp. 12.660.000,- atau capaian keuangan Rp. 99.06% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25,335,000.00 | 25,170,500.00 | 99.35 | Terdapat sisa anggaran belanja habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp. 164.500,- yaitu anggaran belanja makanan dan minuman rapat. Realisasi keuangan Rp 25.170.500,- atau capaian keuangan sebesar Rp. 99.35% | |  | |
| 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 624,417,800.00 | 613,660,261.00 | 98.28 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.757.539,- yaitu anggaran belanja perjalanan dinas yang sifatnya dipersiapkan apabila ada kegiatan yang akan dikoordinasikan baik dalam daerah maupun luar daerah. Realisasi keuangan Rp. 613.660.261,- atau capaian keuangan sebesar Rp. 98.28% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **392,543,600.00** | **379,841,698.00** | **96.76** |  | |  | |
| 2.13.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 165,408,600.00 | 154,292,000.00 | 93.28 | tersisa sisa nego pejabat pengadaan untuk belanja modal yang lebih murah daripada penganggaran sebesar Rp. 11.116.600,- dengan rincian yaitu anggaran Belanja honor pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 400.000,-; belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor sebesar Rp. 253.000,- ; belanja modal alat pendingin(AC) sebesar Rp. 1.110.000,- ; belanja modal alat studio lainnya (LCD) sebesar Rp. 1.000.000,- ; belanja modal personal komputer (notebook) sebesar Rp. 8.350.000,- dan belanja modal peralatan personal komputer sebesar Rp. 3.600,-. Realisasi keuangan Rp. 154.292.000,- atau capaian keuangan sebesar Rp. 93.28% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun dan terus melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pejabat pengadaan. | |
| 2.13.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 227,135,000.00 | 225,549,698.00 | 99.30 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.585.302,- dengan rincian yaitu belanja rehab Kantin PKK sebesar Rp. 189.772.863,- dan Perencanaan penambahan ruang Kantor DPMD sebesar Rp. 27.026.835,- Realisasi keuangan Rp. 22.549.698,- atau 99.30% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **161,820,200.00** | **159,196,300.00** | **98.38** |  | |  | |
| 2.13.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20,596,200.00 | 19,750,300.00 | 95.89 | Terdapat sisa belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan sebesar Rp. 845.900,- dengan rincian yaitu belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 433.200,- dan belanja kertas dan cover sebesar Rp. 344.700,-. Realisasi keuangan Rp. 19.750.000,- atau 95.89% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik | 78,224,000.00 | 76,446,000.00 | 97.73 | Terdapat sisa anggaran belanja tagihan air sebesar Rp. 1.778.000,- yang sifatnya disiapkan. Realisasi keuangan Rp. 76.446.000,- atau 97.73% | |  | |
| 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 100.00 | Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 63.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 63.000.000. Capaian keuangan 100%. | |  | |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **161,010,000.00** | **149,046,500.00** | **92.57** |  | |  | |
| 2.13.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 95,200,000.00 | 84,186,500.00 | 88.43 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.013.500,- terdiri dari belanja pemeliharaan kendaraan dinas 2 roda empat dan 12 roda dua sebesar Rp. 5.720.500,- dan belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 5.293.000. Dan terealisasi Rp 84.186.500,- (88.43%). Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan. | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya | 14,810,000.00 | 13,860,000.00 | 93.59 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 950.000,- terdiri dari belanja pemeliharaan alat kantor lainnya sebesar Rp. 500.000,- belanja pemeliharaan alat pendingin sebesar Rp. 250.000,- belanja personal komputer sebesar Rp. 200.000,- Realisasi keuangan Rp 13.860.000 (93.59%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan kantor | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 100.00 | Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 51.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 51.000.000. Capaian keuangan 100%. | |  | |
|  | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **44,873,160.00** | **41,429,647.00** | **92.33** |  | |  | |
| 2.13.02.2.01.01 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 44,873,160.00 | 41,429,647.00 | 92.33 | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.443.513,- terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 10.000, belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 143.160,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 35.000,- belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 1.750.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 1.505.353,- merupakan sisa hasil negoisasi pengadaan barang dan jasa melalui E - Catalog dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 1.505.353,- yang dipersiapkan untuk menghadiri rapat pemekaran desa yang diprakarsai desa yang mengusulkan pemekaran desa. Capaian Realisasi Keuangan Rp. 41.429.647,- atau 92.33% | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
|  | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **791,552,400.00** | **740,278,715.00** | **93.52** |  | |  | |
| 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 10,655,600.00 | 10,394,000.00 | 97.54 | Terdapat sisa belanja barang pakai habis pakai merupakan hasil negoisasi pengadaan barang dan jasa oleh pejabat pengadaan melalui E - Katalog, sebesar Rp. 261.600,- yaitu belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 70.300,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 95.450,- dan belanja bahan cetak sebesar Rp. 95.850,-. | | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. | |
| 2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 127,214,150.00 | 119,586,990.00 | 94.00 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 7.627.160,- dengan rincian yaitu barang pakai habis untuk nego pejabat pengadaan belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 42.400,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 37.200,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 390.750,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 72.000,- merupakan hasil negoisasi pejabat pengadaan melalui E - Katalog, belanja tenaga administrasi Rp. 1.000.000,- hal ini dikarenakan adanya upah jasa yang mengundurkan diri pada bulan Desember 2023 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 6.084.810,-. anggaran ini dipersiapkan perjalanan dinas dalam rangka harmonisasi Peraturan Bupati di Kantor Kemenkumham Wilayah Makassar | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 38,372,600.00 | 37,310,050.00 | 97.23 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 1.062.550,- dengan rincian yaitu belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan e katalog belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 60.800,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 13.400,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 109.350,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 879.000,- merupakan anggaran sisa dari perjalanan dinas Asistensi Penyusunan RKPdes di Kecamatan. Realisasi keuangan Rp. 37.310.050,- atau 97.23% | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | 169,442,400.00 | 159,773,150.00 | 94.29 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 9.669.250,- dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 225.800,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 86.600,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 34.930,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 36.000,- merupakan hasil negoisasi pengadaan barang dan jasa oleh pejabat pengadaan melalui E - Katalog dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 9.285.920,- , anggaran dipersiapkan untuk koordinasi dengan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan regulasi penyusunan APBdes Pokok Tahun 2024. Capaian realisasi keuangan Rp. 159.773.150,- atau 94.29% | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.04.2.01.05 | Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 170,634,000.00 | 147,964,500.00 | 86.71 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 22.669.500,- dengan rincian belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 11.000,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 1.000,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 17.500,- belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 140.000,- dan belanja sewa hotel sebesar Rp. 22.500.000,-. Capaian realisasi keuangan Rp. 147.964.500,- atau 86.71%  Hal ini dikarenakan kelas peserta bimtek  digabungkan dan kamar yang disediakan pihak hotel tidak mencukupi. | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.04.2.01.07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 23,736,650.00 | 21,895,320.00 | 92.24 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 1.841.330,- dengan rincian belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 60.800,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 20.800,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 29.730,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 1.730.000,- anggaran ini dipersiapkan untuk Monitoring penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2023, namun pelaksanaannya dirangkaikan dengan Monitoring Penyusunan LPPD Akhir Tahun 2023. Capaian realisasi keuangan Rp. 21.895.320,- atau 92.24% | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.04.2.01.10 | Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa | 54,931,200.00 | 53,517,660.00 | 97.43 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 1.413.540,- dengan rincian belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 53.200,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 42.600,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 49.740,- Belanja tenaga administrasi sebesar Rp. 1.000.000 dikarenakan adanya 1 (satu) orang tenaga upah jasa mengundurkan diri bulan Desember 2023 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 250.000,-. Realisasi keuangan Rp. 53.517.660,- atau 97.43% | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 57,855,000.00 | 54,418,750.00 | 94.06 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 3.436.250,- dengan rincian belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 22.800,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 53.200,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 1.017.750,- Belanja komputer sebesar Rp. 40.000,- dan belanja makanan minuman jamuan tamu sebesar Rp. 17.500,-. Realisasi keuangan Rp. 54.418.750,- atau 94.06% | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.04.2.01.14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 138,710,800.00 | 135,418,295.00 | 97.63 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 3.292.505,- dengan rincian belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 97.600,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 44.800,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 32.105,- Belanja komputer sebesar Rp. 68.000,- belanja bahan honor narasumber, moderator sebesar Rp. 3.000.000 dan belanja sewa hotel sebesar Rp. 50.000,-. Realisasi keuangan Rp. 135.418.295,- atau 97.63%. karena 2 (dua) jam pelajaran disatukan | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
|  | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1,123,546,830.00** | **1,020,632,710.00** | **90.84** |  | |  | |
| 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 127,857,080.00 | 111,123,500.00 | 86.91 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 16.733.580,- dengan rincian belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 275.780,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 10.100,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 563.500,- Belanja komputer sebesar Rp. 51.000,- belanja makan minum rapat sebesar Rp. 203.200,- belanja narasumber sebesar Rp. 1.400.000,- belanja jasa tenaga administarsi sebesar Rp. 12.000.000,- Hal ini dikarenakan 1 orang upah jasa mengundurkan diri, dan rolling staf antar bidang dan belanja perjalanan dinas Rp.2.230.000 karena sebagian anggaran perjalanan dinas yaitu akomodasi dan transport ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi terkait Pokjanal. Realisasi keuangan Rp. 111.123.500,- atau 86.91% | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 155,471,800.00 | 135,311,140.00 | 87.03 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 20.160.660,- dengan rincian belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 38.750,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 239.000,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 287.810,- Belanja komputer sebesar Rp. 188.000,- belanja makan minum rapat sebesar Rp. 226.100,- belanja jasa tenaga administarsi sebesar Rp. 13.000.000,- dan belanja perjalanan dinas Rp. 6.181.000,-. Hal ini dikarenakan upah jasa yang berhenti dan pindah ke bidang lain. Realisasi keuangan Rp. 135.311.140,- atau 87.03% | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 15,340,000.00 | 15,340,000.00 | 100.00 | Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 15.340.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 15.340.000. Capaian keuangan 100%. | | Agar PPTK melakukan koordinasi dan konsultasi kepada DPMD provinsi terkait pelaksanaan TTG, dan mencermati perubahan target kinerja pada saat perubahan anggaran | |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 824,877,950.00 | 758,858,070.00 | 92.00 | Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 66.019.880,- dengan rincian belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 3.360.600,- belanja barang pakai habis pakai untuk nego pejabat pengadaan yaitu belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 78.000,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 281.900,- belanja bahan cetak sebesar Rp. 204.760,- Belanja komputer sebesar Rp. 91.800,- belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 5.251.416,- belanja makan minum rapat sebesar Rp. 14.500.000,- belanja makan minum jamuan tamu sebesar Rp. 58.600,- belanja makan minum pada fasilitas urusan sosial sebesa Rp. 36.000.000,- belanja honor narasumber sebesar Rp. 4.000.000,- belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesa Rp. 280.000,- belanja sewa hotel 1.700.000,- belanja hadiah perjalanan dinas sebesar Rp. 112.804,- dan belanja modal kursi kerja pejabata Rp. 100.000,-. Hal ini mengantisipasi makanan yang akan dibawa ke wilayah yang jauh jaraknya dan/atau sebelah danau sudah tidak layak makan dikarenakan harus memakai catering 1 vendor pada kegiatan fasilitasi urusan sosial (BKK Stunting) . Realisasi keuangan Rp. 758.858.070,- atau 92.00% | | Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran maupun target kinerja dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran | |
|  | | **5,609,165,991.00** | **5,284,270,439.00** | **94.21** |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BAB 4** | PENUTUP |  |

* 1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance.*

Berdasarkan hasil analisa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, bahwa capaian indikator utama sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target tahun 2023 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | 8.87 |
| 2. | Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial | 0.71 |
| Indeks Ketahanan Ekonomi | 0.70 |
| Indeks Ketahanan Lingkungan | 0.71 |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Niali SAKIP | 71.00 |

**Capaian Indikator Kinerja Utama**

Rata-rata nilai capaian indikator dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 122,32%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran | Indikator KInerja | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | 8.87 | 19.20 | 216.46 | Sangat Memuaskan |
| 2. | Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial | 0.71 | 0.74 | 104.23 | Sangat Memuaskan |
| Indeks Ketahanan Ekonomi | 0.70 | 0.50 | 71.43 | Sangat Baik |
| Indeks Ketahanan Lingkungan | 0.71 | 0.69 | 97.18 | Sangat Memuaskan |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Niali SAKIP | 71.00 | Belum dapat diukur karena nilai realisasinya baru akan bisa didapatkan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) | | |

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini tercatat dalam 7 (tujuh) analisis yang menunjukkan trend peningkatan dalam efisiensi penggunaan anggaran 94.21% dan peningkatan capaian kinerja utama di tahun 2023 sebesar 122,32% dari tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.609.165.991,- terealisasi sebesar Rp. 5.284.270.439,- atau persentase capaian sebesar 94.21%.

* 1. Langkah Perbaikan Kinerja

1. Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan stakeholder terkait atas pemenuhan 3 variabel IDM yang masih kurang.
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama Tim Pendamping Desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan capaian 3 variabel IDM (IKS, IKE dan IKL)
3. Melaksanakan rapat koordinasi staf pertriwulan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
   1. Saran

Dalam mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, diharapkan :

1. Dukungan sumber daya manusia dalam meningkakan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.
2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang dianggap masih rendah.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan penyampaian informasi satu data.
   1. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Tahun 2022 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tahun 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Rekomendasi | Tidak Lanjut |
| 1. | Menyempurnakan dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan, target kinerja kepala bidang disupport oleh target kinerja level dibawahnya sampai staf | Setiap pegawai telah menyusun perjanjian kinerja dan SKP dalam penetapan target kinerja yang ingin dicapai. |
| 2. | Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan tidak hanya menjadi tanggungjawab kepada Kasubag Perencanaan | Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait hasil pengukuran kinerja |
| 3. | Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, dari hasil pengukuran memberikan hal yang sama kepada staf. | Melakukan review dan perbaikan indikator kinerja |
| 4. | Kepala Dinas sebagai pengambil Keputusan (Decision Maker) terlibat langsung dalam mengukur capaian kinerja bawahannya dan pejabat dibawanya melakukan hal yang sama kepada staf | Menyusun dokumen laporan akuntabilitas kinerja mengacu pada ketercapaian PK dan SKP pejabat struktural, fungsioanl dan pelaksana untuk pengukuran kinerja output dan dipantau pencapaiannya berdasarkan target rencana aksi yang ditetapkan. |
| 5. | Pengukuran kinerja sebaiknya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja | Memasukkan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berbagai media sebagai bentuk pertanggung  jawaban kepada publik; |
| 6. | Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja | Peningkatan kualitas laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 7. | Membuat Perkada tentang tunjangan kinerja dan mekanisme pembayaran Tukin yang kaitannya dengan capaian kinerja | Ditindaklanjuti oleh instansi terkait |
| 8. | Membuat Pedoman pola mutasi/rotasi (terdapat penjelasan mutase dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya) | Ditindaklanjuti oleh instansi terkait |
| 9. | Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dengan narasi yang memadai | Telah menginfokan kualitas capaian kinerja beserta hambatannya |
| 10. | Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) | Mengenai perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional, tidak kami dapati indikator pembanding yang setara untuk dilakukan Analisasi perbandingan. Namun, melihat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi selatan, dapat disandingkan antara indikator sasaran strategis Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan. Serta melakukan Bencmark Kinerja |
| 11. | Dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dengan rekomendasi perbaikan kinerja | Telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dengan rekomendasi perbaikan kinerja |
| 12. | Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk meningkatkan kinerja. | Telah dilaksanakan sosialisasi capaian kinerja dalam laporan kinerja kepada selurh pegawai dan diimplementasikan melalui pemantauan pencapaian kinerja secara berjenjang |
| 13. | Menginformasikan dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. | Telah menginfokan penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dalam laporan kinerja |
| 14. | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifias dan efisensi kinerja | Evaluasi kinerja Intenal secara berjenjang setiap triwulan telah dilaksanakan oleh masing-masing unit/bidang melalui Evaluasi Kinerja Bidang melalui Rapat Intenal dan laporan Evaluasi Kinerja Bidang. |
|  |  |  |

**DAFTAR TABEL**

*hal.*

Tabel1.1 Data Pegawai DPMD Kab. Luwu Timur berdasarkan Pendidikan

Tahun 2023 ....................................................................................... 7

1.2 Data Pegawai DPMD Kab. Luwu Timur Berdasarkan

Pangkat/Golonagan Ruang .................................................................. 8

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD Kab. Luwu Timur.............. 18

* 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD Kab. Luwu Timur

(Versi PermenPAn-RB No. 9 89 Tahun 2021) …..........…………................ 19

2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023 ................................. 20

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 DPMD ................................................... 22

2.5 Penjelasan atas Sasaran,Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan ..23

2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Tahun 2021-2026

(Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 ...................................................... 27

2.7 Program dan Pagu Anggarang APBD-P Tahun 2023 ............................... 30

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ................................................................ 34

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Stategis DPMD dan Desa Kab. Luwu Timur ....... 34

3.3 Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 Target Tehadap realisai

Tahun 2023 ....................................................................................... 34

* 1. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian

Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Pada Tahun 2023 ..................... 36

* 1. Desae Mandiri Yang Mengalami Peningkatan Status di

Kabupaten Luwu Timur Pada Tahun 2023 ............................................. 37

* 1. Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Target Terhadap

Realisasi selama 5 (Lima) Tahun (2019-2023) ...................................... 38

* 1. Capaian Indikator Kinerja Strategis DPMD dan Desa Kabupaten

Luwu Timur Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026 ............... 39

3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Daerah Lain

Tahun 2023 ..................................................................................... 40

3.9 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ...... 42

3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Target Terhadap Realisasi

Tahun 2023 .................................................................................... 44

* 1. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian

Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa Pada Tahun 2023 ................. 45

* 1. Capaian Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa Target Terhadap

Realisasi selama 2 (dua) Tahun (2022-2023) ......................................... 46

* 1. Capaian Indikator Kinerja Strategis DPMD dan Desa Kabupaten

Luwu Timur Dibandingkan target RJMD/Resnstra 2021-2026 ................ 47

3.14 Realisasi Kinerja dan Standar Nasonal ................................................... 47

3.15 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ........ 49

3.16 Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian

Indikator Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Pada

Tahun 2023 ....................................................................................... 51

3.17 Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Target

Terhadap Realisasi Selama 2 (dua) Tahu (2022-2023) .......................... 52

* 1. Capaian Indikator Kinerja Strategis DPMD dan Desa Kabupaten

Luwu Timur Dibandingkan Target RPJMD/Renstra 2021-2026 ................ 53

3.19 Reaslisasi Kinerja dan Standar Nasional ................................................ 53

3.20 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ....... 55

3.21 Perandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian Indikator

Indeks Ketahan Lingkungan Masyarakat Desa Pada Tahun 2023 ............. 57

* 1. Capaian Indek Ketahana Ekonomi Masyarakat Desa Target Terhadap

Realisasi Selama 2 (dua) Tahun (2022-2023) ........................................ 58

* 1. Capaian Indikator Kinerja Strategis DPMD dan Desa Kabupaten

Luwu Timur Dibandingkan Target RPJMD/Renstra 2021-2026 ................ 59

* 1. Reaslisasi Kinerja dan Standar Nasional ................................................ 59
  2. Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ....... 61
  3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Target Terhadap Realisasi

Tahun 2023 ...................................................................................... 63

* 1. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Nilai Sakip

DPMD dan Desa Pada Tahun 2023 ...................................................... 64

* 1. Komponen Penilaian Kinerja terhadap Dokumen LAKIP DPMD dan

Desa ............................................................................................... 64

* 1. Nilai SAKIP DPMD dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2019-2023 ............................................................................. 65

* 1. Capaian Indikator Kinerja Strategis DPMD Kabupaten Luwu Timur

Dibandingkan Target RPJMD/Renstra 2021-2026 .................................. 66

* 1. Perbandingan Nilai SAKIP DPMD Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan

Dengan DPMD Kan. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023 …… 68

* 1. Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ....... 71
  2. Belanja Daerah DPMD TahunAnggaran 2023 ......................................... 75
  3. Realisasi Keuangan, Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi

Perbaikan Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................. 75

**DAFTAR GAMBAR**

*hal.*

**Gambar** 1 Bagan Stuktur Oganisasi Dina Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ..................................................... 6